

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

Laporan Keuangan (408906)

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023
(Audited)



Jl. Raya Abepura No. 37 Abepura Jayapura
Telp. (0967) 586147 Fax. (0967) 586112

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM Papua yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Jayapura, 8 Mei 2024
Kepala Kantor Wilayah

Anthony Mathius Ayorbaba, SH., M.Si
NIP. 197105151996101001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	31
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	37
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
F. Pengungkapan Penting Lainnya	46
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jayapura, 8 Mei 2024

Kepala Kantor Wilayah



Antonius Mathius Ayorbaba, SH.,M.Si
NIP. 197105151996101001

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp204.459.423,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp21.046.803.852,00 atau mencapai 99,27% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp21.289.659.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp102.163.729.824,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp39.349.200,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp102.124.380.524,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp23.494.106,00 dan Rp102.140.235.718,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.011.390,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp23.116.379.061,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(23.111.367.671,00). Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp199.448.033,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(22.911.919.638,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp103.505.639.190,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp(22.911.919.639,00) kemudian ditambah dengan koreksi yang menambah / mengurangi ekuitas senilai Rp(88.011.563,00) dan transaksi antar entitas senilai Rp21.634.527.729,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp102.140.235.718,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA. 2023		% thd Angg	TA. 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1		204.459.423	0,00	49.781.042
JUMLAH PENDAPATAN		-	204.459.423	0,00	49.781.042
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	9.700.817.000	9.603.667.415	99,00	9.698.142.035
Belanja Barang	B.4	10.986.014.000	10.842.337.437	98,69	6.019.761.167
Belanja Modal	B.5	602.828.000	600.799.000	99,66	3.112.059.224
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		21.289.659.000	21.046.803.852	99	18.829.962.426

II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.2	-	20.380.408
Persediaan	C.3	39.349.200	27.767.500
Jumlah Aset Lancar		39.349.200	48.147.908
ASET TETAP			
Tanah	C.4	38.965.824.000	38.965.824.000
Peralatan dan Mesin	C.5	14.921.382.915	13.471.887.205
Gedung dan Bangunan	C.6	71.090.135.841	71.178.147.404
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.7	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.8	1.428.516.060	1.418.310.720
Konstruksi Dalam Pekerjaan	C.9	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.10	(24.281.478.192)	(21.561.736.102)
Jumlah Aset Tetap		102.124.380.624	103.472.433.227
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.11	-	7.750.000
Aset Lain-Lain	C.12	2.012.183.963	3.135.306.183
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.13	(2.012.183.963)	(3.136.274.933)
Jumlah Aset Lainnya		-	6.781.250
JUMLAH ASET		102.163.729.824	103.527.362.385
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.14	23.494.106	21.723.195
Uang Muka dari KPPN	C.15	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		23.494.106	21.723.195
JUMLAH KEWAJIBAN		23.494.106	21.723.195
EKUITAS			
Ekuitas	C.16	102.140.235.718	103.505.639.190
JUMLAH EKUITAS		102.140.235.718	103.505.639.190
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		102.163.729.824	103.527.362.385

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA. 2023	TA. 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	5.011.390	10.400.317
JUMLAH PENDAPATAN		5.011.390	10.400.317
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	9.603.667.415	9.698.142.035
Beban Persediaan	D.3	205.942.500	264.296.663
Beban Barang dan Jasa	D.4	4.760.512.035	3.191.920.475
Beban Pemeliharaan	D.5	1.393.127.701	865.033.931
Beban Perjalanan	D.6	4.493.324.820	1.741.785.643
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	2.659.804.590	2.641.797.791
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8		
JUMLAH BEBAN		23.116.379.061	18.402.976.538
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(23.111.367.671)	(18.392.576.221)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9		
Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar		156.129.500	-
Beban Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		43.318.533	39.380.725
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		43.318.533	39.380.725
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		199.448.033	39.380.725
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(22.911.919.638)	(18.353.195.496)
POS LUAR BIASA	D.10		
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(22.911.919.638)	(18.353.195.496)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA. 2023	TA. 2022
EKUITAS AWAL	E.1	103.505.639.190	102.706.235.931
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(22.911.919.638)	(18.353.195.496)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
LAIN-LAIN		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.5	(88.011.563)	300.000.000
KOREKSI LAIN-LAIN	E.6	-	-
		-	-
Jumlah Lain-lain		(88.011.563)	300.000.000
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		21.634.527.729	18.852.598.755
EKUITAS AKHIR	E.8	102.140.235.718	103.505.639.190

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

*Dasar Hukum
Entitas dan*

*Rencana
Strategis*

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah. Entitas berkedudukan di Jalan Raya Abepura No 37 Jayapura.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua berkomitmen dengan visi **“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.

- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Tahun 2022 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar

nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan

penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin

dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan serta jalan, jaringan dan irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan

waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri

Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan

sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset

dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya Perubahan Halaman III DIPA, revisi Pagu Minus Belanja Pegawai, dan adanya penambahan anggaran pada Belanja Modal dari pusat. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	9.236.495.000	9.700.817.000
Belanja Barang	10.361.120.000	10.986.014.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Belanja Modal	602.828.000	602.828.000
Jumlah Belanja	20.200.443.000	21.289.659.000

Realisasi

Pendapatan

Rp204.459.423,00

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp204.459.423,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua berasal dari Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan berupa sewa Rumah Dinas yang ditempati oleh

Pejabat maupun Pegawai dan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

TA 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	156.129.500	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	5.011.390	-
Penerimaan Kembali Belanja barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	5.333.333	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	37.985.200	-
Jumlah	-	204.459.423	-

Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 310,72% dibandingkan realisasi TA 2022, selain itu terdapat kenaikan pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN sebesar 1449,38% dari Rp10.400.317,00 menjadi RP161.140.890,00 dan Pendapatan Lain-lain sebesar 10,00% dari Rp39.380.725,00 menjadi Rp43.318.533,00 dibandingkan dengan tahun anggaran yang lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA. 2023	TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	161.140.890	10.400.317	1449,38
Pendapatan Lain-lain	43.318.533	39.380.725	10,00
Jumlah	204.459.423	49.781.042	310,72

Realisasi

Belanja Negara

Rp21.046.803.852,00

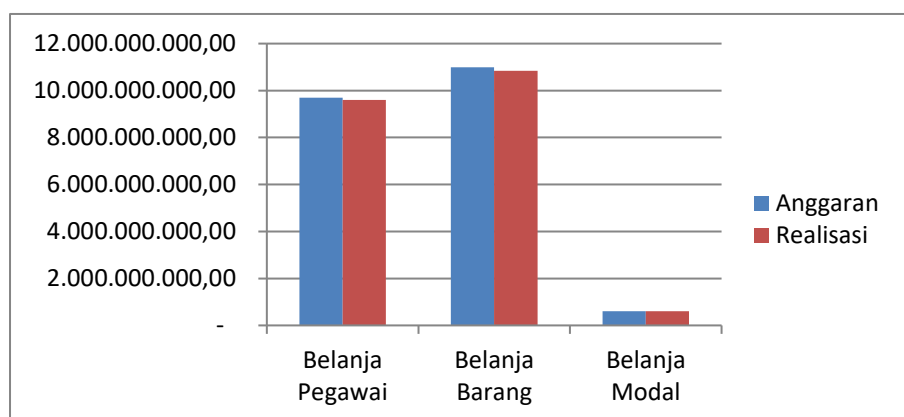
B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp21.046.803.852,00 atau 99,27% dari anggaran belanja sebesar Rp21.289.659.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2023

Uraian	TA. 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	9.700.817.000	9.609.373.889	99,06
Belanja Barang	10.986.014.000	10.924.726.357	99,44
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Belanja Modal	602.828.000	600.799.000	99,66
Total Belanja Kotor	21.289.659.000	21.134.899.246	99,27
Pengembalian Belanja		88.095.394	#DIV/0!
Total Belanja	21.289.659.000	21.046.803.852	98,86

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja TA 2023 mengalami Kenaikan sebesar 11.77% dibandingkan realisasi belanja pada TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya Penambahan Anggaran pada Belanja Barang di TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA. 2023	TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	9.603.667.415	9.698.142.035	(0,97)
Belanja Barang	10.842.337.437	6.019.761.167	80,11
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	600.799.000	3.112.059.224	(80,69)
Jumlah	21.046.803.852	18.829.962.426	11,77

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp9.603.667.415,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.603.667.415,00 dan Rp9.698.142.035,00.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja TA 2022 mengalami penurunan sebesar 0,97% persen dari realisasi belanja TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya mutasi pegawai keluar di tahun anggaran 2023.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA. 2023	TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	9.515.032.889	9.608.771.521	(0,98)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	94.341.000	90.728.000	3,98
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	9.609.373.889	9.699.499.521	(0,93)
Pengembalian Belanja Pegawai	(5.706.474)	(1.357.486)	320,37
Jumlah Belanja	9.603.667.415	9.698.142.035	(0,97)

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp10.842.337.437,0

0

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.842.337.437,00 dan Rp6.019.761.167,00. Realisasi Belanja Barang TA 2023

mengalami kenaikan sebesar 80,11% dari Realisasi Belanja Barang TA 2022.

Hal ini disebabkan antara lain karena telah adanya adaptasi new normal dibandingkan masa Pandemi Covid-19 pada anggaran belanja barang Tahun Anggaran 2022 yang masih dibatasi dan adanya *Refocussing* Anggaran dan adanya penambahan Belanja Barang terkait penerimaan CPNS TA 2023.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA. 2023	TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.937.629.314	1.430.691.599	35,43
Belanja Barang Non Operasional	976.403.900	492.230.599	98,36
Belanja Jasa	1.824.470.002	1.263.302.832	44,42
Belanja Pemeliharaan	1.407.016.901	874.598.731	60,88
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4.575.571.240	1.746.731.497	161,95
Belanja Barang Persediaan	203.635.000	217.151.763	(6,22)
Jumlah Belanja Kotor	10.924.726.357	6.024.707.021	81,33
Pengembalian Belanja	(82.388.920)	(4.945.854)	
Jumlah Belanja	10.842.337.437	6.019.761.167	80,11

Belanja Modal
Rp600.799.000,00

B. 5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp600.799.000,00 dan Rp3.112.059.224,00 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar 80,69% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena Pagu Anggaran yang diberikan hanya berupa Belanja Peralatan dan Mesin

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA. 2023	TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	600.799.000	405.949.820	48,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	2.706.109.404	(100,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	600.799.000	3.112.059.224	0,00
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	600.799.000	3.112.059.224	-80,69

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp600.799.000,00, mengalami kenaikan sebesar 48,00% bila dibandingkan dengan TA 2022 yaitu sebesar Rp405.949.820,00.

Hal ini disebabkan antara lain karena terdapat penambahan anggaran belanja modal peralatan dan mesin di Tahun Anggaran 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

Peralatan dan Mesin

TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA. 2023	TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Alat Angkutan Darat Bermotor Udara	0	0	#DIV/0!
Alat Pengolahan	0	0	#DIV/0!
Alat Kantor	79.799.000	0	#DIV/0!
Alat Rumah Tangga	481.000.000	0	#DIV/0!
Peralatan Pemancar	0	0	#DIV/0!
Alat Kedokteran	0	0	#DIV/0!
Peralatan Komputer	40.000.000	405.949.820	100,00
Jumlah Belanja Kotor	600.799.000	405.949.820	48,00
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	600.799.000	405.949.820	48,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Belanja dibayar

C.1 Belanja dibayar dimuka

Dimuka

Nilai Belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp20.380.408,00.

Rp0,00

Persediaan

C.2 Persediaan

Rp.39.349.200,00

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar 39.349.200,00 dan Rp27.767.500,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TA. 2023	TA. 2022
Barang Konsumsi	39.349.200	27.767.500
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Pita cukai, Materai dan Leges	-	-
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan ke masyarakat	-	-
Jumlah	39.349.200	27.767.500

Tanah

C. 3 Tanah

Rp38.965.824.000,00

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua per 31 Desember 2023

dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp38.965.824.000,00 dan Rp38.965.824.000,00

Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan Penilaian Kembali Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura berupa tanah.

*Peralatan dan
Mesin*
Rp14.921.382.915,00

C. 4 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14.921.382.915,00 dan Rp13.479.637.205,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	Rp	13.479.637.205
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	600.799.000
Transfer Masuk	Rp	840.946.710
Transfer Keluar	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	14.921.382.915
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp	(12.918.641.234)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	Rp	2.002.741.681

Mutasi tambah :

PEMBELIAN					
No	Uraian Transaksi	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
1	Pembelian	A.C. Split	6	Buah	Rp 36.000.000
2	Pembelian	Camera Digital	1	Buah	Rp 18.599.000
3	Pembelian	Lemari Kayu	6	Buah	Rp 48.000.000
4	Pembelian	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Buah	Rp 40.000.000
5	Pembelian	Workstation	40	Buah	Rp 350.000.000
6	Pembelian	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	Buah	Rp 20.000.000
7	Pembelian	Meja Rapat	3	Buah	Rp 30.000.000
8	Pembelian	Televisi	2	Buah	Rp 17.000.000
9	Pembelian	Mesin Absensi	2	Buah	Rp 16.300.000
10	Pembelian	LCD Projector/Infocus	3	Buah	Rp 24.900.000
TOTAL					Rp 600.799.000

TRANSFER MASUK					
No	Uraian Transaksi	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai
1	Transfer Masuk	Unit Power Supply	7	Buah	Rp 34.160.000
2	Transfer Masuk	Handy Talky (HT)	6	Buah	Rp 44.705.340
3	Transfer Masuk	Public Address (Lapangan)	1	Buah	Rp 90.000.000
4	Transfer Masuk	P.C Unit	7	Buah	Rp247.310.000
5	Transfer Masuk	Lap Top	11	Buah	Rp415.836.960
6	Transfer Masuk	Printer (Peralatan Personal Kompuetr)	2	Buah	Rp 8.934.410
TOTAL					Rp840.946.710

Gedung dan

Bangunan

Rp71.090.135.841,00

C. 5 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp71.090.135.841,00 dan Rp71.178.147.404,00.

Mutasi nilai gedung dan bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	Rp 71.178.147.404
Mutasi tambah:	
Pengembangan Melalui KDP	Rp -
Koreksi Susulan	Rp (88.011.563)
Saldo per 31 Desember 2023	Rp 71.090.135.841
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp (11.362.836.958)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp 59.727.298.883

Aset Tetap

Lainnya

Rp1.428.516.060,00

C. 6 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp1.428.516.060,00 dan Rp1.418.310.720,00. Aset tetap tersebut berupa bahan perpustakaan tercetak, Kartografi, naskah dan lukisan, barang bercorak kesenian, alat bercorak kebudayaan.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
(Rp24.281.478.192,00)*

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing (Rp24.281.478.192,00) dan (Rp21.561.736.102,00.) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 14.921.382.915	Rp 12.918.641.234	Rp 2.002.741.681
2	Gedung dan Bangunan	Rp 71.090.135.841	Rp 11.362.836.958	Rp 59.727.298.883
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -
4	Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
Akumulasi Penyusutan		Rp 86.011.518.756	Rp 24.281.478.192	Rp 61.730.040.564

*Aset Lain-Lain
Rp2.012.183.963,0
0*

C.8 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp2.012.183.963,00 dan Rp3.135.306.183,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp2.012.183,00)*

C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.012.183,00 dan Rp3.135.306.183,00. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	2.012.183.963	2.012.183.963	0
Jumlah	2.012.183.963	2.012.183.963	0

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp23.494.106,00*

C.10 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp23.494.106,00 dan Rp21.723.195,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Hutang pihak ketiga merupakan hutang listrik atas pemakaian listrik bulan Desember 2023.

*Ekuitas
Rp102.140.235.718,00*

C.11 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp102.140.235.718,00 dan Rp103.505.639.190,00. Ekuitas adalah merupakan

kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
PNBP
Rp5.011.390,00*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp5.011.390,00 dan Rp10.400.317,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA. 2023	TA. 2022	NAIK (TURUN) %
PNBP Lainnya	5.011.390	10.400.317	(51,82)
Jumlah	5.011.390	10.400.317	(51,82)

PNBP Lainnya merupakan Pendapatan dari pengelolaan BMN berupa Pendapatan dari Sewa Rumah negara yang ditempati oleh Pejabat/Pegawai yang dipotong langsung pada Gaji Bulanan Pejabat/Pegawai tersebut selama TA 2023 sebesar Rp5.011.390,00.

*Beban Pegawai
Rp9.603.667.415,00*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.603.667.415,00 dan Rp9.698.142.035,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TA. 2022	TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan tunjangan	9.509.326.415	9.607.712.335	(1,02)
Beban Lembur	94.341.000	90.429.700	4,33
Jumlah	9.603.667.415	9.698.142.035	(0,97)

Beban

Persediaan

Rp205.942.500,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp205.942.500,00 dan Rp264.296.663,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA. 2023	TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	205.942.500	264.296.663	(22,08)
Beban persediaan pita cukai, materai dan leges	-	-	-
Beban persediaan bahan baku	-	-	-
Beban persediaan lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	205.942.500	264.296.663	(22,08)

Beban Barang

dan Jasa

Rp4.760.512.035,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.760.512.035,00 dan Rp3.191.920.475,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA. 2023	TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	21.676.000	11.600.000	86,86
Beban Barang Non Operasional	129.155.000	66.824.999	93,27
Beban Langganan Daya dan Jasa	358.340.882	289.823.715	23,64
Beban keperluan perkantoran	1.684.071.411	1.225.360.829	37,43
Beban Jasa Profesi	47.700.000	36.800.000	29,62
Beban penambah daya tahan tubuh	0	0	#DIV/0!
Beban pengiriman surat dinas pos pusat	2.522.200	15.068.669	-83,26
Beban honor operasional satuan kerja	226.200.000	171.600.000	31,82
Beban bahan	606.298.900	376.755.600	60,93
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	74.000.000	0	#DIV/0!
Beban honor output kegiatan	166.950.000	48.650.000	243,17
Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid-19	0	54.842.000	-100,00
Beban Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid-19	3.159.703	7.062.101	-55,26
Beban Jasa Lainnya	5.000.000	1.000.000	400,00
Beban sewa	1.435.580.439	886.532.562	61,93
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-142.500	0	#DIV/0!
Jumlah	4.760.512.035	3.191.920.475	49,14

Beban

Pemeliharaan

Rp4.760.512.035,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.760.512.035,00 dan Rp865.033.931,00. Beban

Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TA. 2022	TA. 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	359.305.816	360.602.000	-0,36
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	504.904.115	523.455.134	-3,54
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	824.000	23.009.995	-96,42
Jumlah	865.033.931	907.067.129	-4,63

Beban

Perjalanan

Dinas

Rp4.493.324.820,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.493.324.820,00 dan Rp1.741.785.643,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA. 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TA. 2022	TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	3.958.171.240	1.479.060.643	167,61
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000	65.700.000	-90,87
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	611.400.000	197.025.000	210,32
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	-10.846.420	0	#DIV/0!
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting	-71.400.000	0	#DIV/0!
Jumlah	4.493.324.820	1.741.785.643	157,97

Beban

Penyusutan dan
Amortisasi

Rp2.659.804.590,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.659.804.590,00 dan Rp2.641.797.791,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

TA 2023 dan 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA. 2023	TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	789.428.947	812.473.869	-2,84
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.870.375.643	1.828.355.172	2,30
Beban Amortisasi Software		968.750	0,00
Jumlah Penyusutan			
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.659.804.590	2.641.797.791	0,68

Surplus/Defisit
dari Kegiatan
Non

Operasional

Rp43.318.533,00

D.8 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional

TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA. 2023	TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Penjualan alat angkutan darat bermotor	0	0	0,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	#DIV/0!
Penerimaan kembali belanja barang TAYL	5.333.333	-39.379.800	-113,54
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	0	-925	-100,00
Beban kerugian pelepasan aset	0	0	0,00
Penerimaan kembali belanja Modal TAYL	37.985.200	0	#DIV/0!
Pendapatan penyesuaian nilai persediaan	0	0	#DIV/0!
Beban penyesuaian nilai persediaan	0	0	#DIV/0!
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	43.318.533	-39.380.725	-210,00

**)Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode harga perolehan terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).*

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp103.505.639.190,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp103.505.639.190,00 dan Rp102.706.235.931,00.

Surplus/Defisit

LO

Rp(22.911.919.638,00)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah defisit sebesar Rp(22.911.919.638,00) dan Rp(18.353.195.496,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara

surplus/defisit kegiatan operasional, surplus / defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

Koreksi Yang Menambah.Mengurangi Ekuitas Rp(88.011.563,00)

E.3 Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Ekuitas

E.3.1 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp88.011.563,00 dan Rp300.000.000,00.

E.3.2 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp(88.011.563,00) dan Rp300.000.000.

Transaksi Antar Entitas Rp21.634.527.729,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp21.634.527.729,00 dan Rp18.852.598.755,00. Transaksi Antar Entitas terdiri:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari entitas lain	(204.459.423,00)
Ditagihkan ke Entitas Lain	21.046.803.852,00
Transfer Masuk	792.183.300,00
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengambilan Hibah Langsung	-
Jumlah	21.634.527.729,00

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan

belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar (Rp204.459.423,00) sedangkan DKEL sebesar Rp21.046.803.852,00

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari suatu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp792.183.300,00

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Kanwil Kemenkumham Papua (408905)	415.836.960
2	Peralatan dan Mesin	Kanwil Kemenkumham Papua (408904)	247.310.000
3	Peralatan dan Mesin	Kanwil Kemenkumham Papua (408902)	74.125.660
4	Peralatan dan Mesin	Kanwil Kemenkumham Papua (408903)	44.705.340
5	Aset Tetap lainnya	Kanwil Kemenkumham Papua (408910)	10.205.340
<i>Akumulasi Penyusutan</i>			-
Jumlah			792.183.300

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir

Rp102.140.235.718,00

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp102.140.235.718,00 dan Rp103.505.639.190,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN – LAIN

- Adanya Anggaran Belanja Tambahan pada Belanja Pegawai sebesar Rp464.322.000,00 dan Belanja Barang untuk Pengadaan CPNS sebesar Rp624.894.000,00
- Adanya penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp5.333.333,00 berupa setoran atas Sewa Rumah bagi Pejabat Kanwil yang belum sesuai ketentuan Surat Perjanjian yang mengakibatkan kelebihan pembayaran
- Adanya setoran Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp37.985.200,00 yang berupa Selisih volume pada pekerjaan Renovasi Gedung Pekerjaan Lantai 2 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua .
- Telah dilakukannya Koreksi Aset sebesar (Rp88.011.563,00) terhadap hasil temuan ITJEN
- Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua memiliki Tanah, yang diatas Tanah tersebut di bangun rumah Negara golongan II yang ditempati oleh pejabat yang telah mutasi / pensiun dan pegawai yang telah pindah ke instansi lain dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Seluas 397 m², dibangun rumah negara golongan II, yang ditempati oleh Pensiunan atas nama Bapak Silas Dirk Enock yang terletak di Jl. Agats Dok V Bawah Kelurahan Mandala Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura.
 - Seluas 875 m² , dibangun rumah negara golongan II , di Jalan Sawo Kelurahan Argapura Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura yang di tempati oleh Pegawai yang telah pindah ke instansi lain an. Ibu Hana Hikoyabi.
 - Masih dikuasai Rumah Negara Gol 1 Type C Permanen yang di tempati oleh pegawai yang mutasi ke Kanwil Papua Barat An Nelly H Marani,SH.,M.H

- 1 (satu) unit Sepeda Motor NUP.5 senilai Rp12.100.000,00 milik Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, dikuasai oleh Bpk. Abdul Kadir, SH. Pensiunan Pegawai Kanwil Hukum dan HAM Papua.
- 1 (satu) unit Notebook Lenovo Y310 (tahun perolehan 2009) senilai yang di pegang oleh Bpk. Ruben Mandowen, SH (pensiunan) , mantan Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan
- Terdapat Barang Milik Negara yang hilang berupa 1 unit kendaraan dinas roda 2 dengan Nomor Polisi DS 6077 AG dan telah dilakukan pemeriksaan dengan nomor Berita Acara Pemeriksaan Noomor :W.30.KU.03.04-313 tanggal 14 Oktober 2019.
- Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nomor : W.30-001.KU.03.03 Tahun 2023 Tanggal 04 Januari 2023 Tentang Penetapan Kuasa Penggunaan Anggaran, Pejabat Penguji SPM, PPK, Bendahara 9 DIPA, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan PPABP Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua terdiri atas :
 - Kuasa Pengguna Anggaran :
Anthonius Mathius Ayorbaba, SH., M.Si
 - Pejabat Pembuat Komitmen Satker 408906 :
Daniel Rumsowek, S.Pd
 - Pejabat Penguji/Penandatanganan SPM :
Hendrik Pagiling, SH., MH
 - Bendahara Pengeluaran :
Murniati, S.Pd

Lampiran 1: Penyusutan Aset Tetap

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

Penyusutan / Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku
Aset Tetap

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm.Peny	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2023	Per 31-12-2023
A	Tanah				
1	Tanah PERSIL		38.965.824.000	-	38.965.824.000
	Jumlah		38.965.824.000	-	38.965.824.000
B	Peralatan dan Mesin				
1	Alat Bantu	7	452.870.000	452.870.000	-
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	2.805.629.450	2.805.629.450	-
3	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	1.430.000	1.430.000	-
4	Alat Angkutan Bermotor Udara		11.605.000	3.191.375	8.413.625
5	Alat Pengolahan	4	7.095.000	7.095.000	-
6	Alat Kantor	5	1.960.965.522	1.869.485.522	91.480.000
7	Alat Rumah Tangga	5	2.481.118.717	2.069.602.253	411.516.464
8	Alat Studio	5	709.725.272	681.760.472	27.964.800
9	Alat Komunikasi	5	197.725.288	94.490.482	103.234.806
10	Peralatan Pemancar	10	1.313.520.000	1.115.436.000	198.084.000
11	Alat Kedokteran	5	835.445.404	594.736.601	240.708.803
12	Unit Alat Laboratorium	8	197.905.100	96.205.663	101.699.437
13	Alat Khusus Kepolisian	4	40.465.239	40.465.239	-
14	Komputer Unit	4	2.424.386.058	1.668.819.777	755.566.281
15	Peralatan Komputer	4	1.457.996.865	1.393.923.400	64.073.465
16	Alat SAR		23.500.000	23.500.000	-
	Jumlah		14.921.382.915	12.918.641.234	2.002.741.681
C	Gedung dan Bangunan				
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	66.784.147.841	10.265.206.499	56.518.941.342
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	4.170.830.000	1.079.914.583	3.090.915.417
3	Tugu/Tanda Batas	50	135.158.000	17.715.876	117.442.124
	Jumlah		71.090.135.841	11.362.836.958	59.727.298.883
D	Jaringan				
1	Instalasi Lain	5	-	-	-
	Jumlah		-	-	-
E	Aset Tetap Renovasi				
1	Tanah Dalam Renovasi		1.325.360.000	-	1.325.360.000
	Jumlah		1.325.360.000	-	1.325.360.000
F	Aset Tetap Lainnya				
1	Bahan Perpustakaan Tercetak		103.156.060	-	103.156.060
	Jumlah		103.156.060	-	103.156.060
G	Aset Tetap Yang Tidak digunakan				
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	674.160.500	674.160.500	-
2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	-	-	-
3	Alat Kantor	5	93.452.999	93.452.999	-
4	Alat Rumah Tangga	5	717.699.380	717.699.380	-
5	Alat Studio	5	35.398.000	35.398.000	-
6	Alat Komunikasi	5	21.076.000	21.076.000	-
7	Komputer Unit	4	470.397.084	470.397.084	-
8	Peralatan Komputer	4	-	-	-
9	Barang Bercorak Kesenian	4	-	-	-
			2.012.183.963	2.012.183.963	-
	Total		128.418.042.779	26.293.662.155	102.124.380.624